



**2024**

**LAPORAN  
KINERJA**

**KPKNL SURAKARTA**

## NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

<i>INTEGRITAS</i>	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
<i>PROFESIONALISME</i>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
<i>SINERGI</i>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
<i>PELAYANAN</i>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
<i>KESEMPURNAAN</i>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## DAFTAR ISI

<b>Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia.....	3
D. Aspek Strategis.....	6
E. Sistematika Laporan.....	8
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Realisasi Anggaran.....	35
<b>BAB IV  PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
▪ LAMPIRAN 1     : FORMULIR CAPAIAN KINERJA	

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Surakarta dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Surakarta secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan alat kendali serta berfungsi sebagai *feedback* untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menetapkan visi untuk tahun 2020-2024 adalah *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Visi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. RKT Tahun 2024 berfungsi sebagai rencana kerja operasional dan kuantitatif yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Bahwa KPKNL Surakarta pada Tahun 2024 sedang berusaha untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diraih KPKNL Surakarta pada tahun 2019. Sebagai predikat tertinggi dalam memberikan



pelayanan yang optimal kepada publik, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPKNL Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi demi tercapainya predikat tersebut. Tetapi untuk tahun 2024 ini KPKNL Surakarta belum berhasil meraih predikat tersebut.

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja tahun 2024, KPKNL Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,62%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* dengan hasil seluruh iku hijau dan tidak terdapat IKU kuning. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Surakarta sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Surakarta tahun 2024 dan menjadi tolok ukur kegiatan di tahun berikutnya. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kami sampaikan terima kasih juga kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPKNL Surakarta yang telah memberikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami akan menerima dan mempertimbangkan saran/usulan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tahun berikutnya.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Target dan Realisasi

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja KPKNL Surakarta selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian kinerja selama tahun 2024 pada KPKNL Surakarta, sehingga laporan ini dapat berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Misi DJKN.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surakarta tahun 2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2024.

Capaian kinerja 18 (delapan belas) yang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17%
<b>Customer Perspective(20%)</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan StandarKebutuhan (SBSK).	71,5%
		2c-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal.	3a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu penyelesaian layanan penilaian	86%

<b>Internal Process Perspektif (25%)</b>				
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Presentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 %
6.	Penerapan tata Kelola piutang negara dan lelanbg yang produktif	6a-CP	Presentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%
		6b-CP	Presentase produktifitas lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Presentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
8.	SDM yang Kompeten.	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.	90%
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a- CP	Indeks kinerja anggaran.	100%
		9b- CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82%

Selanjutnya terdapat IKU yang diadendum pada tanggal 31 Mei 2024 yaitu IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara dan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Serta addendum pada 20 November 2024 terhadap IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara dan Presentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara. Adapun Adendum atas IKU tersebut dikarenakan terdapat perubahan trajectory sebagaimana ketentuan dalam KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, addendum target dilakukan apabila capaian IKU periode berjalan telah mencapai/melebihi target periode berikutnya.

Selanjutnya rincian target, realisasi serta indeks capaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Indeks Max. 120 (Nilai Kinerja)
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	117,09%	117,09	117,09
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	100,00
	<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	94,84%	132,64	120,00
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100,00%	115,61	115,61
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal				
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	118,24%	118,24	118,24
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	101,93%	101,93	101,93
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	90,00	120,00	120,00
	<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	110,25%	110,25	110,25
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,00%	120,00	120,00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%	45,95%	132,43	120,00

6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	103,17%	115,92	115,92
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,12%	199,25	120,00
	<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	113,50%	126,11	120,00
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99,02	116,49	116,49
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120,00	120,00	120,00
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	0,00%	200,00	120,00
10	Komunikasi Publik yang Efektif				
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	110,00	137,50	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	98,78	120,46	120,00
<b>NKO = 115,62</b>					

## B. Langkah-langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif kedepan yang harus dilakukan oleh KPKNL Surakarta untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2025 mendatang, antara lain adalah:

1. Terus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
2. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang,

serta sosialisasi piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, tata cara penyerahan dan pengurusannya;

4. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
5. Mengintensifkan upaya pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang untuk meningkatkan produktivitas lelang;
6. Sosialisasi layanan permohonan lelang online kepada *stakeholders* lelang;
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penilai melalui diklat maupun *knowledge sharing* untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
8. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada seksi-seksi/unit lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal;
10. Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPKNL Surakarta yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari :

## ORGANISASI DAN SDM



### C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

#### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang cukup representatif dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber, Surakarta. Selain itu, KPKNL Surakarta juga memiliki tanah seluas 1.043 m<sup>2</sup> yang berasal dari penyerahan KPPN Surakarta berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara yang pada tahun 2018 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya Gang Blewah XIII, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Adapun prasarana yang ada antara lain adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan roda 2	5	4	-	1
2	Kendaraan roda 4	4	4	-	1
3	Komputer dan laptop	71	52	4	15
4	Perangkat Pendukung Komputer	48	34	11	3

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dan keahlian dengan sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut :

### Komposisi SDM berdasar Kepangkatan

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	IV	1	-	-	-	-	1	2	4
2	III	-	12	5	5	5	3	6	36
3	II	-	-	1	-	1	-	1	3
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		1	12	6	5	6	5	9	43

### Komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	Laki-laki	1	9	2	3	4	1	7	27
2	Perempuan	-	3	4	2	2	3	2	16
	<b>Jumlah</b>	1	12	6	5	6	4	9	43

### Komposisi SDM berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	S-2	-	-	1	-	-	1	2	4
2	D-IV/ S-1	1	7	2	4	4	2	6	26
3	D-III	-	3	3	-	2	-	1	9
4	D-I	-	1	-	1	-	-	-	2
5	SLTA	-	1	-	-	-	1	-	2
	<b>Jumlah</b>	1	12	6	5	6	4	9	43

### Komposisi SDM berdasar Usia

No	Usia	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	18 - 30	-	-	1	-	-	-	1	2
2	31 - 40	-	6	2	-	3	1	3	15
3	41 - 50	-	4	2	3	2	2	4	17
4	Diatas 50	1	2	1	2	1	1	1	9
	<b>Jumlah</b>	1	12	6	5	6	4	9	43

### Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi

	Umum	PKN	PN	HI	KI	Jml
<b>Eselon III</b>	-	-	-	-	-	1
<b>Eselon IV</b>	1	1	1	1	1	5
<b>Pelaksana</b>	11	5	4	5	3	28
<b>Jumlah</b>	12	6	5	6	4	34

#### D. Aspek Strategis

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan merupakan implementasi sekaligus antisipasi dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi. Pada cetak biru transformasi kelembagaan tersebut, aspek strategis DJKN meliputi inisiatif strategis dalam fungsi perbendaharaan dan fungsi *special mission*. Fungsi perbendaharaan atau fungsi pengelolaan kekayaan Negara meliputi kegiatan penilaian, inventarisasi dan pengelolaan kekayaan Negara. Sedangkan *special mission* merujuk pada fungsi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai instrumen investasi pemerintah. Pada level KPKNL, aspek strategis dalam fungsi perbendaharaan lebih berperan. Aspek strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Surakarta sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Surakarta mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen penerbitan SUKUK. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro yang masih merasakan dampak Covid19. Titik berat kegiatan pengelolaan kekayaan Negara adalah memberikan kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih

dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

## 2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

## 3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Surakarta antara lain sebagai berikut:

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
- Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- Kementerian Perindustrian (Ditjen. Industri Kecil dan Menengah) Cq. LPT-Indak Propinsi Jawa Tengah
- LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi Dan UMKM
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
- Pusat Pelayanan Teknologi - Badan Riset dan Inovasi Nasional
- RSUD dr. Moewardi Surakarta
- RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta
- Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta  
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten

## 4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Surakarta di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stake holder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi maupun non eksekusi sebagai sarana jual

beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surakarta sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Surakarta memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Surakarta juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

#### **E. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Surakarta tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab IV. Penutup

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menentukan arah kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**, maka ditetapkanlah misi KPKNL Surakarta sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

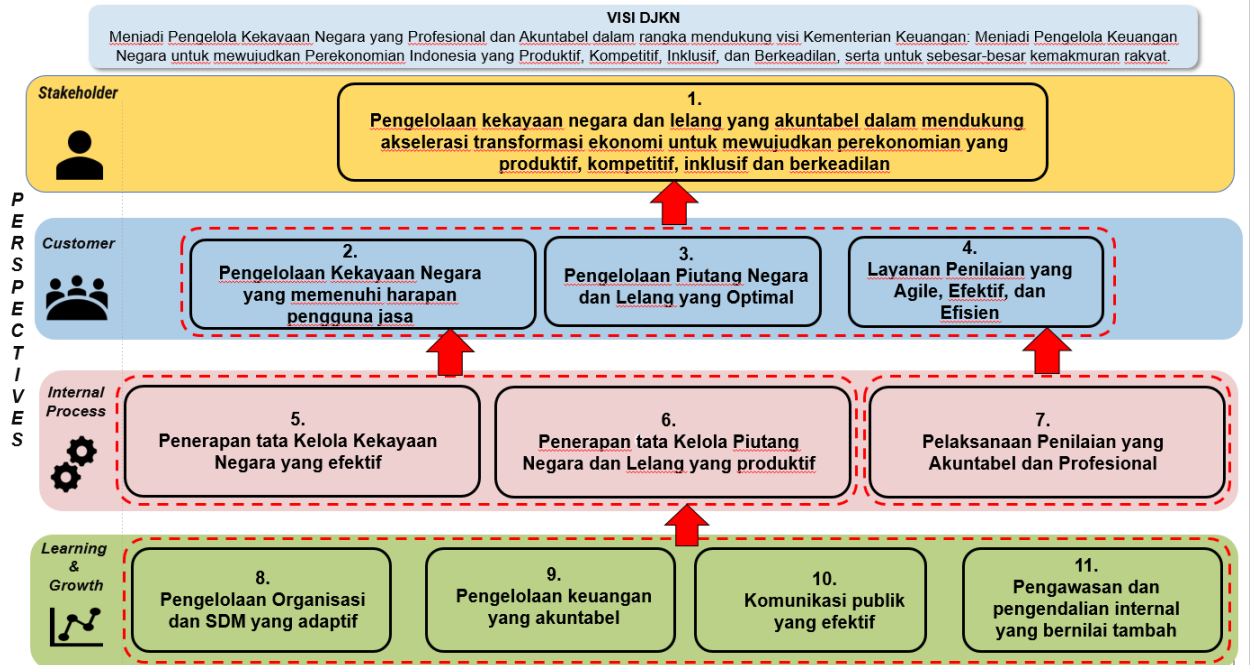
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Surakarta telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif
6. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif
7. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10. Komunikasi Publik yang Efektif

## 11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

### Peta Strategi KPKNL Surakarta

Tahun 2024



Peta strategi KPKNL menetapkan 4 perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*;
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari *customer*/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan;
3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan; dan
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2024 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 18 (delapan belas) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Surakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut.

## SASARAN STRATEGIS DAN IKU

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17%
<b>Customer Perspective(20%)</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan StandarKebutuhan (SBSK).	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal.	3a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu penyelesaian layanan penilaian	86%
<b>Internal Process Perspektif (25%)</b>				
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Presentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 %
6.	Penerapan tata Kelola piutang negara dan lelang yang produktif	6a-CP	Presentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%
		6b-CP	Presentase produktifitas lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Presentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
8.	SDM yang Kompeten.	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai.	90%
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja anggaran.	100%

		9b- CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82%

Adendum IKU pada tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp. 2.5M)	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (54,069M)
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Indeks Kinerja Anggaran	100

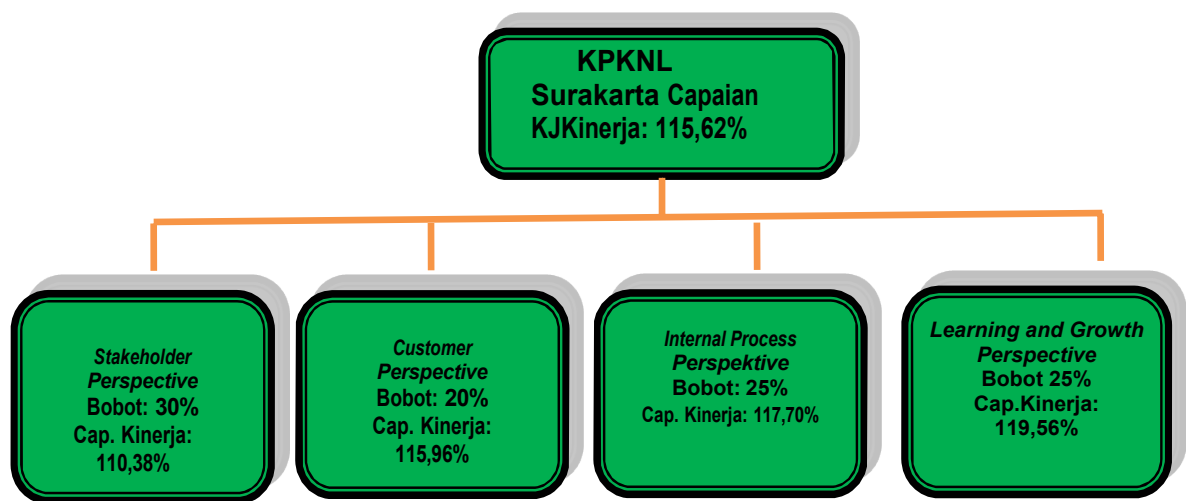
Adendum IKU pada tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (54,069M)	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (56,371M)
9.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	76 (112 Berkas)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68 (100 Berkas)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surakarta tahun 2024 adalah 115,62%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sebagaimana telah disebutkan pada BAB II, sesuai dengan addendum pada tahun 2024, KPKNL Surakarta telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024, sebanyak 18 IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi  $\geq 100\%$ ) sehingga NKO 2024 KPKNL Surakarta tercapai 115,62, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Indeks Max. 120 (Nilai Kinerja)
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				

1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	117,09%	117,09	117,09
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	100,00
	<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	94,84%	132,64	120,00
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100,00%	115,61	115,61
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal				
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	118,24%	118,24	118,24
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	101,93%	101,93	101,93
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	90,00	120,00	120,00
	<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	110,25%	110,25	110,25
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,00%	120,00	120,00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%	45,95%	132,43	120,00
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	103,17%	115,92	115,92
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,12%	199,25	120,00
	<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				

8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	113,50%	126,11	120,00
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99,02	116,49	116,49
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120,00	120,00	120,00
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	0,00%	200,00	120,00
10	Komunikasi Publik yang Efektif				
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	110,00	137,50	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	98,78	120,46	120,00
<b>NKO = 115,62</b>					

Penjelasan atas capaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2024, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian/Realisasi	
	(%)	(RpJuta)	(%)	(RpJuta)
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.	100%	Rp.24.406.874.492,00	117,09 %	Rp.28.578.405.878,00

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%

## 1.a. Presentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (4.074.687.449,2)	100% (8.956.062.347,6)	100% (8.956.062.347,6)	100% (16.278.124.695,2)	100% (16.278.124.695,2)	100% (24.406.874.492)	100% (24.406.874.492)	Max/ TLK
Realisasi	102,71% (4.185.251.197)	99,79% (8.936.822.764)	99,79% (8.936.822.764)	94,46% (15.375.685.484,92)	94,46% (15.375.685.484,92)	117,09% (28.578.405.878)	117,09% (28.578.405.878)	
Capaian	102,71%	99,79%	99,79%	94,46%	94,46%	117,09%	117,09%	
Nilai Kinerja	102,71%	99,79%	99,79%	94,46%	94,46%	117,09%	117,09%	

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari 3 sumber yang dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut:

Kegiatan penghasil PNB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PNBP Pengelolaan BMN	8.003.874.492	10.957.617.610	136,90%
PNBP Piutang Negara	63.000.000	78.378.572	124,41%
PNBP Lelang	16.340.000.000	17.542.409.696	107,36%

Tercapainya target PNB Pengelolaan BMN sebesar 136,90% adalah sebagian besar berasal dari pemanfaatan berupa sewa BMN Rp4.748.055.360,- , pemindahtanganan BMN Rp3.436.531.827,- , Penjualan Barang Rampasan Rp780.298.546,- dan Pendapatan BLU lainnya Rp1.992.731.877,-.

Target PNB PN adalah **Rp 63.000.000** dengan realisasi s.d Triwulan IV 2024 sebesar **Rp 78.378.572(124,41%)** berasal dari pembayaran/pelunasan piutang Negara, serta adanya program crash program keringanan hutang.

Target PNB Lelang adalah **Rp. 16.340.000.000** dengan realisasi s.d Triwulan IV 2024 sebesar **Rp 17.542.409.696(107,36%)** berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (termasuk uang jaminan pembeli wanprestasi) dan Bea Lelang Pegadaian.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring tindak lanjut persetujuan pengelolaan penjualan BMN yang telah disampaikan ke KPKNL dan monitoring data OM SPAN sekaligus SIMPONI
2. Telah melaksanakan penggalian potensi lelang baik melalui surat resmi maupun dengan usulan penugasan langsung kepada stakeholder
3. Koordinasi aktif dengan pemohon lelang
4. Promosi lelang secara aktif melalui media sosial KPKNL Surakarta
5. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku

Adapun rencana aksi untuk dapat mempertahankan capaian IKU ini pada 2025 yang akan datang diantaranya adalah:

1. Koordinasi dan percepatan pelaksanaan lelang yang potensi laku dan *marketable*;
2. Melaksanakan edukasi dan komunikasi secara aktif dengan para pemohon lelang;
3. Penggalian Potensi lelang kepada perbankan; dan
4. Aktif mempromosikan pengumuman lelang melalui media sosial KPKNL Surakarta.

### 1.b. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100	100	100	140	140	103,67	103,67	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	103,67%	103,67%	

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU indeks integritas diantaranya:

1. Sosialisasi kepada pihak internal KPKNL Surakarta dengan materi Hasil Survei Penilaian Integritas, Kerangka Kerja Integritas, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System (WISE)* serta Perlindungan Pelapor yang disampaikan oleh Kepala KPKNL Surakarta sebagai narasumber utama pada tanggal 22 Mei 2024;

2. Sosialisasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pengguna layanan, dan pelaku usaha/rekanan) dengan judul “Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan” yang disampaikan oleh Kepala KPKNL Surakarta sebagai narasumber utama pada tanggal 26 Juni 2024;
3. Kegiatan *integrity sharing* berupa dialog secara formal/informal yang dilaksanakan oleh Kepala KPKNL Surakarta kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional setara 1 s.d. 2 tingkat di bawahnya dengan tema dan metode *integrity sharing* pada tanggal 24 Juni 2024;
4. Amplifikasi konten media sosial berupa konten terkait “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan Saluran Pengaduan WISE pada gratifikasi pada akun social media KPKNL Surakarta dan melalui melalui video animasi di APT KPKNL Surakarta; dan
5. Diseminasi (programm penyaluran informasi) yaitu banner tentang tolak dan laporkan gratifikasi.

IKU Indeks Integritas merupakan IKU dengan target tahunan dengan target sebesar 89,17, dan realisasi di Tahun 2024 sebesar 92,44%.

## Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	94,84%	120

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100%	115,61

### 2.a. Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2024 sebanyak 556 NUP dengan formula perhitungan  $(25\% \times \text{optimalisasi 2023}) + (75\% \times \text{tingkat kesesuaian 2024})$ . Sampai Desember 2024, form yang sudah diupload sebanyak 542 NUP Pengukuran dan 327 NUP Optimalisasi dengan rata-rata nilai kesesuaiannya sebesar 94,84% sehingga realisasi menjadi 132,64% (capaian IKU maksimal 120%).

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/TLK
Realisasi	30%	93,55%	93,55%	97,15%	97,15%	94,84%	94,84%	
Capaian	30%	187,11%	187,11%	161,91%	161,91%	132,64%	132,64%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK diantaranya :

1. Verifikasi data target SBSK 2024;
2. Persiapan dan pelaksanaan survei lapangan untuk pengumpulan data;
3. Membuat surat kepada Satker target untuk menginformasikan kegiatan pengukuran dan penyiapan data awal;
4. Telah dilaksanakan bimbingan teknis Pengukuran Kesesuaian BMN dengan SBSK kepada satker target pada tanggal 24 Juli 2024;
5. Percepatan pengukuran dari data yang telah terkumpul; dan
6. Koordinasi dengan satker Lanud Adi Soemarmo untuk percepatan pengumpulan data.

## 2.b.Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat efektifitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi	10%	86,61%	86,61%	99,21%	99,21%	100%	100%	
Capaian	100	192,48	192,48	165,35	165,35	115,61	115,61	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	115,61%	115,61%	

Penjelasan Capaian:

Pada Semester II Tahun 2023 terdapat 68 surat persetujuan. Dari persetujuan tersebut, 68 surat persetujuan sudah ditindaklanjuti.

Pada Semester I Th 2024 terdapat 59 surat persetujuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 59 surat persetujuan.

Target IKU Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Verifikasi data persetujuan pengelolaan BMN Semester II 2023 dan Semester I 2024;
2. Menyampaikan surat ke satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah diterbitkan pada Semester II 2023 yang belum ditindaklanjuti dan melaporkan hasil tindak lanjut ke KPKNL; dan
3. Koordinasi dengan satker untuk menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN sesuai jangka waktu yang ditentukan.

### Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan Kekayaan dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	118,24%	118,24%

IKU	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penurunan outstanding piutang negara	*Rp56.371.800.000,00	Rp57.457.524.366,81	101,93%

#### 3.a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi IKU ini berasal dari pokok lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Pegadaian di wilayah KPKNL Surakarta pada tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (Rp. 76M)	100% (Rp. 190M)	100% (Rp.190M)	100% (Rp. 304M)	100% (Rp. 304M)	100% (Rp. 380M)	100% (Rp. 380M)	Max/TLK
Realisasi	97,58%	(Rp. 131,29M)	(Rp. 131,29M)	(Rp. 240,22M)	(Rp. 240,22M)	(Rp. 499,3M)	(Rp. 499,3M)	
Capaian	97,58	69,10	69,10	79,02	79,02	118,24	118,24	
Nilai Kinerja	97,58%	69,10%	69,10%	79,02%	79,02%	118,24%	118,24%	

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surakarta tahun 2024 adalah sebesar

Rp380.000.000.000,00, sedangkan Realisasi IKU tersebut sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp449.300.385.002,00 yang terdiri dari:

1. Pokok Lelang PL kelas I Rp.377.534.822.102,00; dan
2. Pokok Lelang Pegadaian Rp.71.765.562.900,00.

Sehingga realisasi hasil lelang KPKNL Surakarta sebesar **118,24 %** dari target.

Pokok lelang Pelelang Kelas I berasal dari pelaksanaan lelang Eksekusi Kepailitan, Eksekusi Hak Tanggungan dan Penetapan Pengadilan, Penghapusan BMN dan lelang Kayu Perhutani.

#### Pokok Lelang KPKNL Surakarta dan Pegadaian TAHUN 2021 – 2024

TAHUN		2021	2022	2023	2024
a.	PL I KPKNL	231.775.144.747	349.925.144.898	235.261.823.636	377.534.822.102
b.	PL II dan Pegadaian	89.179.606.200	66.145.960.700	70.589.516.200	71.765.562.900
JUMLAH		320.954.750.947	416.071.105.59	305.851.339.836	449.300.385.002



Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Surakarta untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk pokok lelang yang berasal dari pegadaian relatif stabil kenaikannya maupun penurunan tiap tahun.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melaksanakan penggalian potensi lelang baik melalui surat resmi maupun dengan usulan penugasan langsung kepada stakeholder
2. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang

potensial Laku

3. Koordinasi aktif dengan pemohon lelang
4. Promosi lelang secara aktif melalui media sosial KPKNL Surakarta

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian,

1. Eksekusi Lelang HT seakan-akan hanya digunakan sebagai shock terapi bagi debitur, sehingga banyak lelang TAP;
2. Obyek lelang kurang *marketable*; dan
3. Banyak pemohon lelang belum memahami peraturan lelang terbaru (PMK 122) sehingga banyak permohonan lelang terpaksa dibatalkan karena belum sesuai ketentuan.

### 3.b. Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKP (nilai saldo piutang negara). Realisasi IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara diperoleh dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara, dengan hasil sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							Pol/KP
	Persentase penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	100% (Rp. 250 juta)	100% (Rp. 53,95M)	100% (Rp. 53,95M)	100% (Rp. 54M)	100% (Rp. 54M)	100% (Rp. 56,37M)	100% (Rp. 56,37M)	Max/TLK
Realisasi	21.487,99% (53,72M)	99,89% (53,95M)	99,89% (53,95M)	104,39% (Rp.56,37M)	104,39% (Rp.56,37M)	101,93% (Rp.57,46M)	101,93% (Rp.57,46M)	
Capaian	21.487,99	99,89	99,89	104,39	104,39	101,93	101,93	
Nilai Kinerja	120%	99,89%	99,89%	104,39%	104,39%	101,93%	101,93%	

#### \*Target Adendum

Target Penurunan Outstanding Piutang Negara pada KPKNL Surakarta tahun 2024 semula sebesar Rp2.500.000.000 kemudian di addendum menjadi Rp 54.069.979.484, dan dilakukan addendum kembali sehingga target menjadi Rp56.371.800.000,00

Realisasi sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebesar **Rp 57.457.524.366,81** atau sebesar **101,93%** dari target tahun 2024.

Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan debitur dan penyerah piutang terkait penyelesaian piutang;
2. Penagihan kepada debitur melalui surat; dan
3. Penelitian lapangan.

Bahwa dalam pengurusan piutang Negara, KPKNL Surakarta telah berupaya untuk melakukan Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara. Pasca Pandemi COVID-9 Pengurusan Piutang Negara dilakukan penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa serta dengan mengirimkan surat penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada PH/PjH, juga dilakukan pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang kepada Penanggung Hutang dan / atau Penjamin Hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat, selain itu juga penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi kepada debitur melalui surat dan media lainnya untuk menagih pembayaran angsuran / pelunasan hutang.

#### **Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%	90%	120%

#### **4.a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian**

Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian diukur berdasarkan penyelesaian penilaian atas permohonan penilaian yang diajukan oleh pemohon berupa laporan penilaian yang disampaikan kepada pemohon sesuai dengan SOP secara tepat waktu.

KPKNL Surakarta	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/Avg
Realisasi	93,86	97,64	97,64	98,37	98,37	90	90	
Capaian	125,15	130,19	130,19	131,16	131,16	120	120	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Indeks Ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian Triwulan IV 2024 adalah sebesar 115 dari target selama tahun 2024 sebesar 115 atau telah tercapai 120% dari total permohonan penilaian.

### Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	110,25	110,25
Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100	120	120,00%

#### 5.a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah pada kementerian dan lembaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2023 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan *output* Sertipikat Hak Atas Tanah;
2. Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan *output* Peta Bidang Tanah (PBT);
3. Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;
4. Kelompok 4/K4: dengan *output* updating data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

KPKNL Surakarta	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20%	56,08%	56,08%	79,61%	79,61%	110,25%	110,25%	
Capaian	100	140,19	140,19	132,68	132,68	110,25	110,25	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	110,25%	110,25%	

Target tahun 2024 sebanyak 617 NUP (1.687 bidang) s.d Q4 KPKNL telah menyelesaikan 110,25% dari target yaitu sebesar 480 NUP (1860 bidang).

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN di wilayah kerja KPKNL Surakarta.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Koordinasi dan rapat dengan KPKNL Jakarta III, Satker PTJT dan PPK pengadaan Jalan Tol;
2. Melakukan koordinasi dengan LMAN terkait tanah jalan tol yang pendanaannya berasal dari pengadaan lahan LMAN;
3. Melakukan monev progres sertifikasi ke Kantor Pertanahan terkait; dan
4. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN terkait alternatif penyelesaian selain deliniasi oleh DJKA.

#### **5.b. Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**

IKU ini berasal dari kegiatan pemanfaatan BMN untuk Fortofolio pada kementerian dan

Lembaga sesuai tabel berikut:

Uraian	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120.00%

No.	Uraian	Target (NUP)	Realisasi (NUP)
1	Pengukuran dan Rekomendasi	92	113
2	Tindak lanjut satker	5	19
	Jumlah	56	65

KPKNL Surakarta	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,88%	43,83%	43,83%	95,65%	95,65%	120%	120%	
Capaian	178,8	136,96	136,96	119,57	119,57	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	119,57%	119,57%	120%	120%	

Target Portofolio Aset sebanyak 92 NUP pengukuran dan rekomendasi, serta 5 paket yang harus ditindaklanjuti oleh Satker. Capaian s.d. Desember 2024 sebesar 120% dengan rincian 113 NUP (120%) dan 19 paket (120%).

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian laporan Portofolio BMN pada satker yang telah diukur evaluasi kinerja asetnya;
2. Percepatan pengukuran evaluasi kinerja BMN pada satker yang menjadi target portofolio BMN; dan
3. Koordinasi dengan satker untuk menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi portofolio asset.

### Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Produktifitas Lelang	68	45,95	120
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	110,25	110,25%

### 6.a. Persentase Produktifitas Lelang

Iku ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot laku lelang yang laku per jenis lelang. Adapaun target dan Capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	Persentase Produktifitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	53,23%	64,06%	64,06%	76,88%	76,88%	103,17%	103,17%	
Capaian	177,43	142,36	142,36	128,13	128,13	115,92	115,92	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	115,92%	115,92%	

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, realisasi persentase produktivitas lelang sebesar 103,17% sehingga capaian menjadi 115,92% dengan rincian :

1. Komponen % Lot Lelang Laku (bobot 40%)= 120%; dan
2. Komponen Frekuensi Lelang (bobot 60%) = 91,95%.

Jumlah Frekuensi Lelang s.d Triwulan IV 2024 sebanyak 1484 dari target tahunan sebanyak 1.614 frekuensi.

Target IKU Persentase Produktifitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melaksanakan penggalian potensi lelang baik melalui surat resmi maupun dengan usulan penugasan langsung kepada stakeholder;
2. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku;
3. Koordinasi aktif dengan pemohon lelang; dan
4. Promosi lelang secara aktif melalui media sosial KPKNL Surakarta.

## 6.b. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara terhadap BKPN yang masih menjadi Outstanding KPKNL Surakarta, Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

KPKNL Surakarta	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif							
	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	96%	90%	90%	81%	81%	68%	68%	Min/TLK
Realisasi	94,59%	88,51%	88,51%	67,57%	67,57%	45,95%	45,95%	
Capaian	101,46	101,65	101,65	116,67	116,67	132,43	132,43	
Nilai Kinerja	101,46%	101,65%	101,65%	116,67%	116,67%	120%	120%	

Target persentase saldo BKPN untuk Tahun 2024 sebesar 76% (dari BKPN aktif s.d Desember 2023 sebanyak 148 BKPN) atau sebanyak 112 BKPN per 31 Desember 2024 kemudian diadendum menjadi 68% (100 BKPN).

Sampai dengan Triwulan IV 2024 realisasi penyelesaian BKPN sebanyak 48 BKPN berasal dari :

1. Pengembalian = 1 BKPN (Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SKPPN) dari BKPN atas nama debitur PT. Abioso Batara Alba penyerahan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup karena dinyatakan pailit)
2. Pelunasan = 5 BKPN
3. PSBDT = 20 BKPN
4. *Crash Program* = 54 BKPN

sehingga saldo BKPN s.d Triwulan IV 2024 sebanyak 68 BKPN (45,95%) dari target Triwulan IV sebesar 68%, sehingga realisasi menjadi 132,43% (capaian IKU maksimal 120%).

Target IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penagihan kepada debitur melalui surat;
2. Penelitian lapangan; dan
3. Menjalani komunikasi dan koordinasi yang baik dengan debitur dan penyerah piutang terkait penyelesaian piutang.

## Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi satu IKU. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	68	45,95	120

### 7.a. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* yang baru pada tahun 2020, dan merupakan IKU Kemenkeu *One*, serta mandatory kepada unit vertikal di DJKN.

KPKNL Surakarta	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0,001%	0,0004%	0,0004%	0,15%	0,15%	0,12%	0,12%	
Capaian	200	200,00	200,00	199,00	199,00	199,25	199,25	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Total permohonan penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 115 permohonan penilaian dengan realisasi persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 0,12% (IKU minimize).

### Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	113,5	120

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	99,02	116,49
--	----	-------	--------

### 8.a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Adapun target dan realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	72,95%	97,05%	97,05%	108,02%	108,02%	113,50%	113,50%	
Capaian	162,12	161,75	161,75	135,03	135,03	126,11	126,11	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU ini adalah dalam rangka pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh KPKNL Surakarta. Dari 43 pegawai pelaksana yang sudah memenuhi standar kompetensi adalah sejumlah 43 (semua sudah memenuhi).

Pada komponen Pemenuhan Jam Pelatihan (JP) sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, Jumlah Pegawai memenuhi 40 JP dan memenuhi usulan DKI sebanyak 43 pegawai dan Jumlah Pegawai melebihi kriteria 40 JP dan memenuhi usulan DKI sebanyak 43 pegawai dari 43 total Pegawai KPKNL Surakarta sehingga capaian = 120% (Rincian perhitungan: [bit.ly/MONITORINGDIKLAT2024](https://bit.ly/MONITORINGDIKLAT2024)).

Capaian subkomponen Bintal Triwulan IV 2024 sebesar 107%.

Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai =  $(120\% + 107\%) / 2 = 113,50\%$ .

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas perkembangan pengembangan pegawai;
2. Mendorong seluruh pegawai untuk segera mengikuti kegiatan pengembangan pegawai;
3. Menyusun perangkat monev pengembangan pegawai; dan
4. Melaksanakan kegiatan Bintalnas minimal 4 kegiatan masing-masing bidang, yaitu: Bidang Rohani, Ideologi, Kompetensi, dan Kejiwaan, Serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 8.b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Target nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2024 sebesar 85. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	98,33	98,33	98,98%	98,98%	99,02	99,02	
Capaian	117,64	115,68	115,68	116,44	116,44	116,49	116,49	
Nilai Kinerja	117,64%	115,68%	115,68%	116,44%	116,44%	116,49%	116,49%	

Review Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Kertas Kerja atas Reuiu Pengelolaan Kinerja dan Risiko dilakukan penilaian oleh kanwil dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 116,49 satuan indeks.

## Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Kinerja Anggaran	100	120	120
Presentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	0	120

### 9.a. Indeks Kinerja Anggaran

IKU ini mengukur kualitas dalam pengelolaan anggaran yaitu kesesuaian dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Beberapa kegiatan yang diukur pada IKU ini adalah Capaian Belanja, tingkat efisiensi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belanja, penyelesaian tagihan belanja dan data kontrak. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Surakarta cukup baik dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

KPKNL Surakarta	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	105,26	104,21	104,21	104,56	104,56	120	120	
Capaian	105,26	104,21	104,21	104,56	104,56	120	120	
Nilai Kinerja	105,26%	104,21%	104,21%	104,56%	104,56%	120	120	

Sesuai Manual IKU Indeks Kinerja Anggaran, Formula Perhitungan Nilai IKU IKA Triwulan IV Tahun 2024 adalah 'Nilai IKPA x 50% + Nilai SMART DJA x 50%'. Nilai SMART DJA hanya diperhitungkan pada bulan Desember 2024, sehingga Nilai IKU IKA Periode Bulan Desember Tahun 2024 = 50% x 99,5+ 50% x 92,11 = 49,75 + 46,055 = 95,805. Indeks Capaian IKU IKA untuk nilai  $\geq 95,00$  adalah 120.

Target IKU Indeks Kinerja Anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan revisi POK apabila diperlukan;
2. Melakukan pemutakhiran RPD untuk belanja setiap bulan;
3. Segera melaksanakan belanja sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan; dan
4. Monitoring penyerapan anggaran dengan memperhatikan target penyerapan anggaran.

### 9.b. Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi; dan
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun target dan Capaian IKU Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Persentase deviasi data PNBP fungsional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/TLK
Realisasi	4,25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	157,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Sehingga pada akhir tahun 2024 diperoleh Capaian IKU ini sebesar 120 (indeks) dengan rincian sebagai berikut:

1. Deviasi PNBP dari Bea Lelang 0%; dan
2. Deviasi PNBP dari Biad PN 0%

Target IKU Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Operator Dropbox Lelang Menginput data PNBP PL I dan Pegadaian pada Dropbox lelang secara Harian untuk mengantisipasi penumpukan beban kerja;
2. Operator Focus PN menginput data PNBP Biad PN segera setelah dilakukan pembayaran oleh debitur;
3. Melakukan perbandingan data PNBP Fungsional DJKN antara OM SPAN dengan Dropbox Lelang dan Focus PN bulan Januari s.d Desember 2024; dan
4. Melaksanakan rekonsiliasi antara operator Drobox dan Operator OM SPAN secara in ternal periode Triwulan I-IV Tahun 2024.

### Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi satu IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	110	120

### 10.a. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

KPKNL Surakarta	Komunikasi Publik yang Efektif							Pol/KP
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	125	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU ini pada 2024 sebesar 110 indeks. Capaian ini dihitung berdasarkan:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan (s.d Juni 2024 belum ada permohonan informasi publik);
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik tahun sebelumnya kepada PPID Pelaksana setingkat di atasnya (laporan disampaikan s.d. 3 hari kerja sebelum jatuh tempo berdasarkan ND penyampaian Laporan PPID tahun 2023 No. ND-35/KNL.0902/2024 tanggal 9 Januari 2024 sehingga capaian indeks = 120); dan
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks 100.

### Sasaran Strategis 11: Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi satu IKU,.

Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Efektivitas UKI	82	98,78	120

### 11.a. Indeks Efektivitas UKI

Nilai indeks efektivitas UKI KPKNL Surakarta adalah sebesar 98,78 dari target sebesar 82, sehingga realisasi menjadi 120,46% (capaian IKU maksimal indeks 120%). Adapun rincian capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

KPKNL Surakarta	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	Indeks efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	98,78	98,78	
Capaian	100	100	100	100	100	120,46	120,46	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Target IKU Indeks Efektifitas UKI berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Sosialisasi terkait pemantauan pengendalian intern kepada seluruh pegawai KPKNL Surakarta; dan
2. Melaksanakan Pemantauan Pengendalian Utama Periode tahun 2024.

## B. Kinerja Lainnya

Selain 18 (delapan belas) IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Surakarta dengan capaian sebagaimana telah diuraikan diatas, KPKNL Surakarta juga telah melakukan kegiatan yang tidak kalah pentingnya bagi organisasi terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta. Salah satu kinerja tersebut adalah Pengelolaan arsip.

Pada Tahun 2024, KPKNL Surakarta menjadi kantor yang ditunjuk dilingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk mewakili lomba tertib arsip di lingkungan DJKN. Melalui Gerakan MERPATI (Menata Arsip dengan Rapi, Tepat dan Teliti) serta dengan slogan “*Arsip Tertata Bekerja Lebih Ceria*” KPKNL Surakarta berusaha untuk mengajak seluruh pegawai untuk membudayakan tertib arsip.

Program ini dilakukan dengan gerakan merapikan arsip setiap hari Jumat baik arsip individu maupun seluruh arsip yang telah berada di Gudang arsip KPKNL Surakarta yang dilakukan oleh seluruh pegawai secara bersama-sama. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan arsip; indeksasi arsip; klasifikasi arsip sesuai kode; pelabelan, pemilahan arsip aktif, inaktif serta musnah; mendaftar arsip; menusunahkan dan menyimpan arsip.

KPKNL Surakarta memperoleh penghargaan sebagai pengelola arsip terbaik I di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



### C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, KPKNL Surakarta mendapatkan anggaran total sebesar Rp2.615.916.000,00. Anggaran tersebut seluruhnya terdiri dari belanja barang sebesar Rp2.342.854.000,00, belanja modal sebesar Rp 273.062.000,00, dan belanja pegawai sebesar Rp0,00 karena untuk belanja pegawai sudah tersentralisasi di Kantor Pusat DJKN.

Realisasi anggaran tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai table berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja pegawai	0	0	0%
Belanja barang	2.342.854.000	2.250.071.301	96,04%
Belanja modal	273.062.000	258.302.946	94,59%
Jumlah Anggaran	2.615.916.000	2.508.374.247	95,88%

### Perbandingan Anggaran KPKNL Surakarta Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2020	2.070.685.000	2.030.279.759	98%	1.943.954.000	1.799.450.266	93%	22.000.000	20.366.377	93%
2021	-	-	0%	1.695.675.000	1.663.469.627	98%	29.740.000	29.740.000	100%
2022	-	-	0%	1.831.014.000	1.747.292.804	95%	-	-	0%
2023	-	-	0%	2.030.728.000	1.909.603.449	94%	609.717.000	567.073.426	93%
2024	-	-	0%	2.342.854.000	2.250.071.301	96%	273.062.000	258.302.946	95%

Tabel diatas menunjukkan data realisasi penyerapan anggaran pada akhir setiap periode Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 menunjuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

## **BAB IV PENUTUP**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai KPKNL Surakarta tahun 2024 ini adalah sebesar **115,62%**. Capaian NKO ini merupakan hasil kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Surakarta yang berasal dari total 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruh IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi  $\geq 100\%$ ).

Seluruh IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (hijau), sebanyak 18 (delapan belas) IKU tersebut yaitu:

- a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
- b. Indeks Integritas;
- c. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- d. Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan;
- e. Persentase realisasi pokok lelang Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset);
- f. Persentase penurunan outstanding piutang negara;
- g. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian;
- h. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan;
- i. Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- j. Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara;
- k. Persentase produktivitas lelang;
- l. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian;
- m. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- n. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;
- o. Indeks kinerja anggaran;
- p. Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN;
- q. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID); dan
- r. Indeks efektivitas UKI.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan Negara
  - a. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satker K/L dalam pengelolaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;

- b. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
  - c. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan penguasaan peraturan pengelolaan BMN melalui kegiatan *capacity building*, diklat teknis, maupun kegiatan lainnya.
2. Pengurusan piutang Negara
- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
  - b. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
3. Pelayanan lelang
- a. Mengintensifkan pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang;
  - b. Meningkatkan kapasitas para Pelelang secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai peraturan/ketentuan lelang;
  - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelelang secara intensif.
  - d. Sosialisasi layanan permohonan lelang *online*.
  - e. Penggalian Potensi lelang UMKM.
4. Pelayanan penilaian
- a. Melakukan *knowledge sharing* dan diskusi internal tentang penilaian untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
  - b. Diklat penyegaran tentang penilaian.
5. Bagian Umum
- a. Asistensi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada Seksi lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
  - b. Konsultasi pengelolaan DIPA dengan Kanwil Perbendaharaan dan/atau KPPN.
6. Kepatuhan Internal
- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal.
  - b. Terkait dengan upaya pencapaian WBBM, KPKNL Surakarta pada tahun 2024 akan melakukan monev atas pencapaian predikat WBK yang telah diraih pada tahun 2018 sekaligus persiapan pembangunan ZI-WBBM pada tahun selanjutnya.
7. Hukum dan Informasi
- Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tugas fungsi KPKNL Surakarta kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat menjadi cermin dan evaluasi serta diharapkan memacu kinerja organisasi yang lebih baik, dan secara eksternal Laporan Kinerja ini menjadi indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap *stakeholders*. Harapannya adalah masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari eksistensi dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surakarta.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : DAFTAR NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL  
SURAKARTA 2024

Kode	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Indeks Max. 120 (Nilai Kinerja)
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	117,09%	117,09	117,09
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	100,00
	<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	94,84%	132,64	120,00
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100,00%	115,61	115,61
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal				
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	118,24%	118,24	118,24
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	101,93%	101,93	101,93
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	90,00	120,00	120,00
	<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	110,25%	110,25	110,25
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,00%	120,00	120,00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%	45,95%	132,43	120,00
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	103,17%	115,92	115,92

7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,12%	199,25	120,00
	<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	113,50%	126,11	120,00
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99,02	116,49	116,49
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120,00	120,00	120,00
9b-CP	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	0,00%	200,00	120,00
10	Komunikasi Publik yang Efektif				
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	110,00	137,50	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	98,78	120,46	120,00
<b>NKO = 115,62</b>					

# Pasti Iso!

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan,  
Integritas, Inovatif dan memberi SOLusi



## **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkono No. 141, Surakarta  
Kode Pos 57136, Telepon 0271-723644